

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI OLEH DINAS PARIWISATA  
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tumija<sup>1</sup>**

**Jadog Bagus Bambang Bayu P**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

tumija@ipdn.ac.id<sup>1</sup>

**Abstract**

*MANAGEMENT OF BEACH TOURIST OBJECTS IN INCREASING LOCAL REVENUE. RESEARCH FOCUS OF THE OFFICE OF TOURISM, CULTURE, YOUTH AND SPORTS OF BLITAR REGENCY, EAST JAVA PROVINCE.*

*This study aims to describe and get an overview of the management of coastal tourism objects in increasing local revenue. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by means of interviews, documentation. The data analysis technique used is the Interactive Model proposed by Miles and Huberman in Sugiyono (2016: 246), namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the management of coastal tourism objects carried out by the Tourism, Culture, Youth and Sports Office in increasing Regional Original Income in Blitar Regency has been carried out and implemented according to existing procedures and regulations, but is still not optimal, because there are still several obstacles that hinder the management process. beach tourism objects. The implementation of management in the field has not been in accordance with the plans that have been made, not all programs have achieved their goals and there is still a lack of supervision.*

**Keywords:** *Management, Coastal Tourism Objects, Regional Original Income (PAD)*

**Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai pengelolaan objek wisata pantai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lokus penelitian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan objek wisata pantai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan adalah Interactive Model yang di

kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada, akan tetapi masih belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan obyek wisata pantai. Pelaksanaan pengelolaan di lapangan belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat, belum semuanya program yang dijalankan mencapai tujuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Objek Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## **PENDAHULUAN**

**Menurut** Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, potensi sektor pariwisata memang perlu dikembangkan dengan harapan mampu mewujudkan tujuan pengelolaan pariwisata pada undang-undang ini, yakni mengenai pendayagunaan, pelestarian dan peningkatan mutu objek dan daya tarik wisata, meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta rasa cinta tanah air menjadi terpupuk, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta terdorongnya pendayagunaan produk dalam negeri.

Sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar adalah salah satu sektor ekonomi yang dikelola secara maksimal. Namun dalam pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga akan berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah dinilai belum maksimal dan belum adanya fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan musola. Tidak hanya itu, pemimpin di daerah juga harus serius dan komitmen dalam mewujudkan program tersebut. Tidak hanya dari pemerintah daerah, akan tetapi masyarakat pun harus bisa mendukungnya agar apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuannya. Meningkatkan kunjungan yaitu berwisata di objek wisata merupakan salah satu dukungan masyarakat. Kabupaten Blitar kaya akan potensi keindahan alamnya yang dapat dikembangkan. Jenis wisata yang ada yaitu wisata alam, wisata sejarah dan wisata lainnya. Salah satunya objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi yaitu pantai yang sangat indah di wilayah tersebut. Berikut daftar objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Blitar.

Tabel 1.1  
Objek Wisata Pantai Kabupaten Blitar

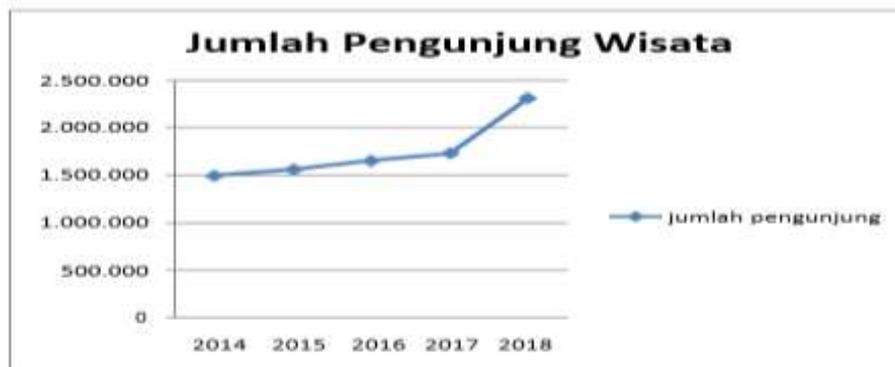
<b>No</b>	<b>Nama Pantai</b>	<b>Jenis Wisata</b>	<b>Alamat</b>
1	Serang	Wisata Alam	Kec. Panggungrejo
2	Peh Pulo	Wisata Alam	Kec. Panggungrejo
3	Jolosutro	Wisata Alam	Kec. Wates
4	Gondomayit	Wisata Alam	Kec. Wonotirto
5	Tambakrejo	Wisata Alam	Kec. Wonotirto
6	Pangi	Wisata Alam	Kec. Bakung

Sumber : BPS Kab. Blitar,2018

Objek wisata pantai sangat menarik dikunjungi oleh warga lokal maupun dari luar daerah Kabupaten Blitar. Berikut ini adalah gambar grafik yang menunjukkan jumlah angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Blitar dalam lima tahun terakhir:

Gambar 1.1

Grafik Jumlah Wisatawan di Kabupaten Blitar



Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018

Menurut gambar grafik 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung dari tahun ketahun mengalami kenaikan di Kabupaten Blitar. Dampak kenaikan jumlah pengunjung wisata ini dapat berpengaruh pada jumlah pendapatan asli daerah jika pengelolaannya optimal. Sementara itu, dari keenam pantai yang ada di Kabupaten Blitar, dapat kita lihat dari tabel 1.2 jumlah kunjungan wisatawan di dua pantai yaitu Pantai Serang dan Tambakrejo dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020. Pada kurun itu, mengalami kenaikan terus menerus sampai 2018 sebanyak 59.179 kunjungan, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 53.779 orang di pantai Serang. Sementara, di pantai Tambakrejo mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2019 sebanyak 189.010 kunjungan. Pada ahun 2020 kedua pantai tersebut mengalami penurunan yaitu menjadi 35.884 kunjungan di pantai Serang dan pantai Tambakrejo hanya 135.699 kunjungan. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.2

Jumlah Kunjungan Objek Wisata Pantai Serang dan Tambakrejo

No	Tahun	Pengunjung Pantai Serang	Pengunjung Pantai Tambakrejo
1	2016	18.469 kunjungan	127.602 kunjungan
2	2017	17.733 kunjungan	116.256 kunjungan
3	2018	59.179 kunjungan	161.028 kunjungan
4	2019	53.779 kunjungan	189,010 kunjungan
5	2020	35.884 kunjungan	135.699 kunjungan

Sumber : Disparbud Pemuda dan Olahraga,2021

Kenaikan jumlah pengunjung wisata pantai akan berdampak pada kenaikan jumlah retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini jumlah kontribusi objek wisata pantai terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.3  
 Kontribusi Retribusi Objek Wisata Pantai Serang terhadap total PAD  
 Kabupaten Blitar Tahun 2017-2019 (dalam rupiah)

No	Indikator	Tahun		
		2017(Rupiah)	2018(Rupiah)	2019(Rupiah)
1	Retribusi Objek Wisata Pantai	414.400.000,00	257.166.638,00	335.739.588,00
2	PAD Kabupaten Blitar	224.106.765.168,00	322.878.943.149,00	252.453.245.801,00
3	Presentase PAD Objek Wisata Pantai terhadap total PAD	0,18%	0,07%	0,13%

Sumber :Disparbudpora & Bapenda Kabupaten Blitar, 2019

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa kontribusi retribusi objek wisata Pantai Serang pada tahun 2017 sebesar 414.400.000,00 atau 0,18% dari jumlah PAD sebesar 224.106.765.168,00, sementara tahun 2018 sebesar 257.166.638,00 (0,07%) dari jumlah PAD 322.878.943.149,00 sedangkan tahun 2019 sebesar 335.379.588,00 (0,13%) dari jumlah PAD 252. Pendapatan Asli Daerah dalam tiga tahun terakhir . Kontribusi pendapatan yang berasal dari objek wisata Pantai Serang tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 karena mulai tahun 2018 ada adanya MoU dalam pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Blitar. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar tahun 2018, pariwisata objek wisata pantai di Kabupaten Blitar belum tergarap secara maksimal. Beberapa kekurangan masih terlihat dalam pengelolaan wisata di kawasan pantai. Pengawasan terhadap pendapatan retribusi wisata dinilai kurang maksimal. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan wisata pantai sudah semestinya diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Blitar harus segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengelolaan objek wisata Pantai Serang oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur? Tujuan

penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan objek wisata pantai dalam meningkatkan PAD yang dijalankan oleh Disparbudpora Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan**

Prajudi dalam Rahardjo Adisasmita (2011:21) menyatakan “Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan bagi penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.” Lebih lanjut Adisasmita (2011:22) menyatakan bahwa, “Pengelolaan ialah bagian proses manajemen sebab didalamnya harus diperhatikan mengenai langkah kerja, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan control, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana.” Sedangkan menurut Terry dalam Sukarna (2011:3) menyatakan “Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.” Selanjutnya juga G.R Terry dalam Sukarna (2011:7) menyatakan bahwa Terdapat empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dan dikenal dengan POAC. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut ialah sebagai berikut :

1) Perencanaan (Planning)

Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:10) menyatakan. Perencanaan adalah proses memilih fakta, menghubungkan fakta, dan mengembangkan dan menggunakan estimasi atau asumsi masa depan dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan.

2) Pengorganisasian (Organizing)

G.R Terry dalam Sukarna (2011:38) mengungkapkan. Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengatur berbagai tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan, serta penempatan orang (karyawan) untuk tugas-tugas ini, penyediaan sumber daya fisik yang sesuai untuk persyaratan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang didelegasikan kepada setiap orang dalam kaitannya dengan pelaksanaan setiap tugas yang diantisipasi.

3) Pelaksanaan (Actuating)

Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:82) menyatakan bahwa: Pelaksanaan adalah untuk memberi energi dan inspirasi kepada semua anggota kelompok untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan selaras dengan perencanaan pimpinan dan upaya organisasi untuk mencapai tujuan. Perencanaan sangat penting untuk gerakan karena menentukan tujuan, anggaran, standar, metode kerja, proses, dan rencana. Gerakan tanpa perencanaan tidak akan efektif

4) Pengawasan (Controlling)

G.R Terry dalam Sukarna (2011:110) mengatakan Untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar, maka pengawasan dapat digambarkan

sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan pelaksanaan. jika perlu melakukan perbaikan (tindakan)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi.

### **Objek Wisata**

Menurut Marioti dalam Yoeti (1996:172) menyatakan bahwa “Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang yang datang berkunjung ke suatu tempat ke daerah tujuan wisata.” Penulis berpendapat, objek wisata biasanya dapat berupa wisata alam seperti gunung, pantai, danau, laut atau objek bangunan. Objek wisata harus dikelola sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu agar daya tarik wisatawan tinggi.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Warsito (2001:128), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Lebih lanjut Darise (2009:48) mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa : Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber penerimaan daerah itu sendiri yang harus ditingkatkan dengan tujuan dapat menanggulangi sebagian beban pengeluaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dan proses pembangunan yang setiap tahunnya cenderung meningkat sehingga perekonomian daerah dapat terwujud pemerintahan mandiri yang nyata, luas, serta bertanggung jawab.

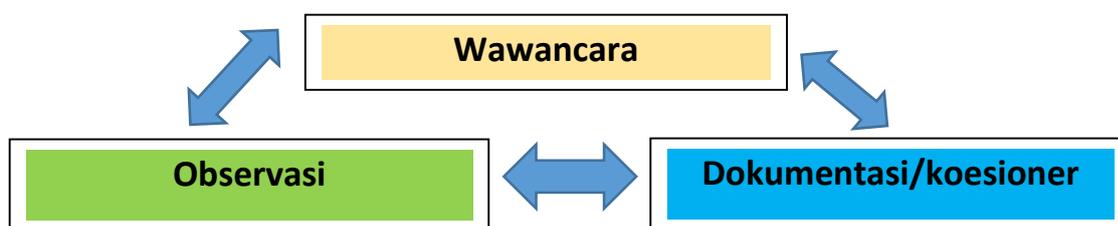
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang pemungutannya berlandaskan pada peraturan daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **METODE**

**Menurut** Silalahi (2012:2) “Penelitian adalah suatu kegiatan penyidik, sistematis dan metode, penelitian sebagai solusi atas suatu masalah untuk menemukan solusi atas suatu masalah dan meningkatkan pengetahuan.” Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha mendapatkan informasi dan mencari

pemahaman berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan/lokasi penelitian untuk dianalisis lebih lanjut dari fenomena yang muncul sehingga gambaran yang jelas dan sistematis diperoleh untuk memecahkan masalah penelitian yang dihadapi.

Data yang diperoleh bersumber dari data primer berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Data sekunder dari berbagai sumber, yaitu dokumen, jurnal, surat kabar, buku, dan peraturan. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data (Sugiyono, 2014) sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1  
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Gambar 3.1, pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Desa, terutama pengurus Bumdes dan semua pihak yang terkait.. Dokumen diperoleh melalui berbagai sumber sebagaimana dijelaskan dalam kaitannya dengan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan terkait Pengelolaan Objek Wisata Pantai oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dapat oleh penulis uraian berdasarkan analisis teori G.R Terry dalam Sukarna (2011:7) sebagai berikut

### Perencanaan

Sesuai teori yang diambil terkait pengelolaan, penulis mengacu pada dua indikator untuk menganalisis dimensi tentang perencanaan yaitu terkait pembuatan asumsi-asumsi (perkiraan) dan perumusan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Blitar. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator.

- a) Pembuatan Asumsi-Asumsi (Perkiraan)

Berkaitan dengan pembuatan asumsi-asumsi atau perkiraan, Dinas terkait Kabupaten Blitar telah membuat perkiraan-perkiraan yang terbagi dalam atas beberapa sub indikator perkiraan dalam rangka mencapai sebuah sasaran pada periode 2016-2021. Berikut adalah tabel mengenai isu strategis dan perkiraan yang dirancang oleh Disparbudpora:

Tabel 4.1

Isu Strategis dan Perkiraan  
 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

<b>Isu Strategis</b>	<b>Indikator Perkiraan</b>	<b>Sub Indikator Perkiraan</b>	<b>Sasaran</b>
Destinasi Wisata'	Daya Tarik Wisata	Banyaknya potensi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan daya saing	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
		Terdapat dukungan dari institusii terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata	
		Naiknya partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi wisata daerah	
	Promosi Pariwisata	Meningkatnya kunjungan touris di objek wisata Kabupaten Blitar	

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar mempunyai asumsi terhadap dua indikator perkiraan yaitu terkait daya tarik wisata dan promosi pariwisata. Semua indikator mempunyai sasaran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Blitar. Mengacu pada data, wawancara serta pengamatan, dapat dikatakan bahwa Disparpora Kabupaten Blitar telah merancang suatu perkiraan-perkiraan dengan baik dan jelas sesuai teori yang penulis ambil terkait pembuatan asumsi atau perkiraan. Akan tetapi, pembuatan perkiraan-perkiraan tersebut juga harus didukung dengan upaya dan tekad untuk terus mengembangkan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur dan menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

b) Perumusan Kegiatan

Perumusan kegiatan merupakan upaya untuk merencanakan segala kegiatan yang akan dilakukan demi mendukung kelancaran suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Upaya merumuskan kegiatan ini juga akan mempermudah mengontrol dan menjalankan suatu proses kegiatan itu dijalankan sehingga kegiatan tersebut akan berjalan secara urut dan terstruktur. Dinas telah merumuskan kegiatan telah merumuskan beberapa program kegiatan periode 2016-2021 yang berkaitan dengan objek wisata pantai. Berikut adalah tabel program kegiatan yang berkaitan dengan objek wisata pantai tersebut:

Tabel 4.2  
Program Kegiatan Bidang Objek Wisata Pantai Serang  
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi dan sarana prasarana
2	Pembinaan SDM pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang dibina
3	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Jumlah tempat wisata yang ditingkatkan
4	Kerjasama Kepariwisataan	Jumlah MoU pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan
5	Promosi Pariwisata	Jumlah acara <i>marketing</i> yang dilaksanakan

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dikatakan bahwa program kegiatan terkait objek wisata pantai yang dirancang oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar memiliki sasaran terhadap meningkatnya jumlah dari setiap program-program yang dilakukan. Pemerintah dituntut untuk memaksimalkan dan merealisasikan semua program kegiatan dengan baik agar pariwisata khususnya objek wisata pantai di Kabupaten Blitar terus berkembang pesat sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Terkait perumusan kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas, penulis beranggapan bahwa perumusan kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah sesuai dengan teori yang penulis ambil. Dinas telah membuat beberapa program secara garis besar untuk periode 2016-2021.

### **Pengorganisasian**

#### a) Penentuan Kegiatan

Pengelolaan yang baik terlihat dari sebuah institusi tersebut menentukan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komponen-komponen pendukung didalamnya. Dinas yang pada hakikatnya merupakan dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata terutama

obyek wisata pantai, telah menentukan beberapa kegiatan sebagai pendukung pengelolaan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kadin Suhendro Winarso, S.STP, M.Si pada Hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan.

“Kami bersama jajaran telah membuat rencana-rencana kegiatan yang akan mendukung pembangunan pariwisata Blitar, seperti festival layang-layang, pelepasan penyu, tradisi satu suro di pantai, serta yang lain-lainnya. Hal itu kami rencanakan untuk menarik wisatawan yang akan berkunjung ke Blitar. diharapkan masyarakat berbondong-bondong datang ke Blitar.”

Hasil wawancara dengan Kabid Pengembangan Destinasi, Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si pada hari Jumat, Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB, Beliau mengatakan bahwa,

“Event yang akan diadakan pemerintah sangat banyak. Hal itu dilakukan untuk mempromosikan wisata pantai di Blitar agar kedepannya semakin terkenal dan disenangi masyarakat. seperti dalam waktu dekat, ada event-event banyak yang tempatnya di pantai yang ada di Blitar.”

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan menunjukkan bahwa Dinas telah merancang dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh komponen-komponen pendukung dengan baik dan terstruktur. Hal itu akan mendukung pembangunan pariwisata objek wisata pantai di Blitar.

#### b) Penempatan Pegawai

Penempatan pegawai pada suatu instansi sangat penting untuk diperhatikan, karena selalu dihubungkan dengan kualitas sumber daya manusia terhadap keahliannya masing-masing. Ketika pegawai tersebut ditempatkan pada posisi yang tepat, komposisi pegawai akan tampak lebih berperan pada tupoksinya masing-masing. Lebih lengkap dan jelasnya, berikut adalah tabel banyaknya pegawai di lingkup instansi Dinas dilihat dari kategorinya:

Tabel 4.3  
Jumlah Pegawai  
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar  
Berdasarkan Kategori Pendidikan

No	Kategori Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pasca Sarjana	11	26,19
2	Sarjana	16	38,10
3	Sarjana Muda	2	4,76
4	SLTA	10	23,81
5	SMP	1	2,38

6	SD	1	2,38
	Jumlah Total	41	100

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, penulis menganalisis bahwa jika dilihat dari jumlah total pegawai, hampir 80% pegawai yang ada di lingkup instansi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah lulusan sarjana. Melihat kondisi tersebut, bisa dikatakan bahwa mutu pendidikan yang ada pada setiap pegawai di lingkup instansi ini hampir sebagian besar sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadin (Bapak Suhendro Winarso, S.STP, M.Si) pada Hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa,

“Komposisi pegawai yang ada sudah mumpuni dan tergolong baik. Sebagian pegawai juga diisi oleh kaum muda yang energik. Akan tetapi banyak juga pegawai yang latar belakang pendidikannya bukan bidang pariwisata. Perlu pembinaan dan pelatihan bertahap lebih lanjut mengenai kepariwisataan agar mutu pegawai yang ada semakin baik. Namun pada intinya, saat ini semua pegawai harus meningkatkan sinergitas dan saling mendukung untuk mensukseskan program-program yang telah dirancang.”

Hasil wawancara dengan Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si, Kabid Pengembangan Destinasi pada hari Jumat, Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB, Beliau mengatakan bahwa,

“Pegawai di lingkup Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sudah diisi oleh lulusan-lulusan sarjana. Tetapi jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, banyak pegawai yang bukan berlatar belakang lulusan ilmu kepariwisataan. Sebenarnya tidak ada masalah, akan tetapi lebih baik lagi jika para pegawai lebih sering diikutkan dalam pelatihan dan seminar terkait kepariwisataan secara bergantian.”

Sesuai komposisi pegawai yang ada di lingkup instansi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sudah tergolong baik. Akan tetapi disisi lain juga bertentangan dengan teori yang penulis ambil terkait penempatan pegawai yakni dalam komposisi pegawai tersebut masih ada beberapa pegawai yang tidak ditunjang dengan latar belakang pendidikan tentang kepariwisataan yang dikuasai oleh para pegawai, artinya penempatan pegawai yang dilakukan masih belum berdasarkan bidang yang sesuai dengan pariwisata.

c) Pelimpahan Wewenang

Dinas sebagai instansi pengatur kebijakan terkait pariwisata telah melakukan pembagian pelimpahan wewenang kepada pihak-pihak terkait yang mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Blitar. Khusus pengelolaan objek wisata pantai, pemerintah telah melakukan kerjasama dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas, pemerintah desa lokasi objek wisata pantai dan Perhutani KPH Blitar. Penandatanganan merupakan keseriusan pemerintah untuk terus melakukan terobosan dalam rangka mengembangkan objek wisata pantai. Berikut adalah gambar bagan kerjasama ketiga pihak tersebut.



Gambar 4.4  
Bagan Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Pantai Kabupaten Blitar  
Sumber : Disparbudpora Kab. Blitar, 2019

Berdasarkan gambar bagan 4.4 di atas, terlihat bahwa ada tiga komponen penting dalam proses kerjasama yang dilakukan, yaitu Dinas, Pemerintah Desa, dan Perhutani KPH Blitar. Ketiga komponen tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan pantai memiliki wewenang masing-masing. Disparbudpora berwenang melakukan publikasi dan perbaikan fasilitas serta sarpras di lokasi wisata. Pemerintah Desa memiliki wewenang sebagai operator lapangan dan pelayanan di lokasi objek wisata. Sementara Perhutani KPH Blitar berwenang sebagai penyedia lahan dan fasilitas lahan untuk mendukung keberadaan objek wisata.

Hasil wawancara dengan Kadin yaitu Bapak Suhendro Winarso, S.STP, M.Si pada Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan.

“Untuk mendukung keberadaan objek wisata pantai, pemerintah telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perhutani KPH Blitar telah melakukan MoU dalam rangka memajukan objek wisata pantai yang ada. Pemerintah berharap, kerjasama yang dilakukan mampu menjawab tantangan masyarakat yang selama ini menginginkan kawasan wisata pantai di Blitar untuk lebih diperhatikan dan dikembangkan lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dwi Handoko selaku Kepala Desa Serang pada Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan.

“Kerjasama yang kami lakukan merupakan bagian dari pengelolaan objek wisata pantai yang efektif. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam memajukan pariwisata di Blitar. Dari kerjasama ini, pihak desa bisa memperoleh pemasukan secara mandiri. Akan tetapi kami agak menyayangkan hasil persentase kerjasama yang disepakati. Memang pihak desa sudah mendapat persentase dana bagi hasil mencapai separuh yaitu sebesar 50%, namun kenyataannya di lapangan kami masih keteteran akan pembiayaan terhadap pegawai yang ada disekitar pantai terutama pegawai portal. Butuh dana tambahan untuk pegawai tersebut. Antara pemasukan dan pengeluaran kadang masih keteteran pengelolaannya. Kami berharap pemerintah memberikan solusi lagi terkait hal itu, agar pegawai di lapangan lebih bersemangat dan totalitas dalam memajukan objek wisata pantai di Blitar.”

Penulis menganalisis bahwa terkait pelimpahan wewenang terhadap pihak-pihak terkait untuk mendukung pengelolaan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas sudah cukup baik. Apalagi sudah dilakukannya kerjasama dengan penandatanganan antara tiga pihak. Walaupun demikian, ada problem dari pihak desa yang meminta solusi terkait biaya tambahan untuk para pegawai di lapangan yang dikarenakan pihak desa selalu keteteran jika pembiayaan tersebut diambil dari dana bagi hasil yang disepakati. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar harus secepatnya mengambil langkah tepat dan cepat untuk menangani masalah tersebut.

### **Pelaksanaan atau Penggerakan**

Berkaitan dengan proses pelaksanaan, penulis menggunakan dua indikator yaitu dari segi pencapaian tujuan dan adanya keserasian dengan perencanaan. Berikut adalah penjelasannya.

#### a) Pencapaian tujuan

Memperhatikan hasil analisis di atas serta data yang didapat saat magang, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah merealisasikan beberapa program sesuai teori yang diambil penulis tentang pencapaian tujuan, dimana realisasi program tersebut membantu kelancaran pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Blitar. Promosi kepariwisataan, adanya kelompok sadar wisata dan ditandatanganinya kerjasama terkait pengelolaan objek wisata pantai bukti nyata pemerintah telah serius dalam mengembangkan objek wisata pantai di Kabupaten Blitar.

#### b) Adanya Keserasian dengan Perencanaan

Mengenai adanya keserasian dengan perencanaan, penulis beranggapan bahwa beberapa kegiatan yang telah direncanakan telah direalisasikan dengan baik. Hanya saja dalam hal kegiatan pembinaan pegawai masih ada halangan dan masalah dalam pelaksanaannya, Dinas masih terus

mengupayakan agar dapat dukungan dana dan persetujuan dari unsur pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Blitar agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin. Sementara dari segi sarana prasarana yang ada di objek wisata pantai ada yang sudah selesai dikerjakan dan ada juga yang masih proses pengerjaan. Dari segi pengembangan daya tarik objek wisata pantai, pemerintah telah gencar-gencarnya mengembangkan terobosan-terobosan jenis pengembangan yakni penyediaan paket transportasi dan perbaikan akses jalan, hal itu sebagai penunjang kenyamanan wisatawan yang datang. Kedepannya, pemerintah harus tetap konsisten dan terus berupaya menjalankan program-program yang sudah ditentukan agar semuanya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

### **Pengawasan**

Penulis dalam menganalisis permasalahan terkait pengawasan menggunakan tiga indikator yaitu penentuan standar, penilaian pelaksanaan dan perbaikan.

#### a) Penentuan Standar

Pengamatan yang dilakukan penulis saat di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pantai di Blitar masih terdapat banyak kekurangan walaupun fasilitas-fasilitas mulai dicicil untuk dikembangkan. Diharapkan pemerintah untuk terus konsisten membangun wisata pantai.

#### b) Penilaian Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. A.W.Kristaliati, M.Si selaku Kepala Seksi Usaha Pengembangan Pariwisata pada Hari Senin, Tanggal 14 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan bahwa,

“Penilaian dari pemerintah provinsi dan pusat memang lebih kepada pemberian penghargaan. Penilaian dan evaluasi secara lapangan menjadi tugas kami yang ada di lingkup kabupaten. kami sering mendapati informasi dari pihak-pihak terkait bahwa ada praktek kecurangan dalam mengelola penerimaan retribusi di tempat wisata. Pemerintah sampai sekarang terus berupaya mengatasi masalah itu. Dari segi pengembangan, kami menilai sudah tergolong baik, hal itu dikarenakan sebagian besar objek wisata pantai di Blitar banyak yang berkembang pesat dan dikenal masyarakat luas.”

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendro Winarso, S.STP, M. pada Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa.

“Kami pernah mendapati informasi dari orang lapangan, ada oknum tertentu yang sering melakukan kecurangan dalam pengelolaan retribusi wisata pantai. Padahal kami sudah menerapkan pengawasan dengan beragam cara. Kami melakukan peninjauan langsung ke lapangan, dan biasanya langsung memberikan complain di lokasi langsung. Kami juga menilai dengan cara memperoleh informasi dari pihak-pihak bahkan dari masyarakat (wisatawan) secara langsung. Jika itu mengenai pujian, kami terima untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk semakin dipertahankan tata pengelolaan yang sudah ada. Sedangkan jika itu mengenai saran dan kritik, kami selalu siap untuk menampung dan menjadi bahan evaluasi bersama bagi kami.”

Penilaian pelaksanaan terkait pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Blitar telah dilakukan dengan baik oleh beberapa pihak yang berwenang, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penulis beranggapan bahwa pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Blitar tergolong baik. Hal itu dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang didapat Kabupaten Blitar kategori kepariwisataan dari tingkat provinsi maupun pusat.

c) Perbaikan

Hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh suatu instansi terhadap apa yang dikelola sesegera mungkin dilakukannya perbaikan. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengelolaan objek wisata pantai telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang dirasa mengganggu lancarnya pengelolaan seperti perbaikan kriteria-kriteria objek wisata pantai yang dianggap belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Pemerintah secara bertahap melakukan renovasi fasilitas pendukung seperti membangun toilet dan tempat ibadah di tempat-tempat objek wisata pantai.

Bapak Suhendro Winarso, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas pada Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB, menyatakan bahwa,

“Objek wisata pantai yang masih belum terdapat fasilitas-fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat ibadah terus kami pantau dan terus kami upayakan untuk segera mungkin dibangun fasilitas-fasilitas tersebut. Kami beserta tim pengelola yang ada di lapangan terus berkoordinasi secara aktif untuk menentukan langkah terbaik guna membenahi sarana prasarana yang perlu ditambah dan dikembangkan.”

Hasil pengamatan di lapangan, pemerintah memang telah secara bertahap membangun fasilitas-fasilitas terkait sarana prasarana pendukung yang dirasa masih kurang. Toilet dan tempat ibadah misalnya, pemerintah telah membangun secara bertahap yang telah dikoordinasikan dengan tim pengelola di lapangan.

## **KESIMPULAN**

**Berdasarkan** hasil analisis maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu Pengelolaan objek wisata pantai yang tangani oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada, akan tetapi masih belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan obyek wisata pantai. Pelaksanaan pengelolaan di lapangan belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat, belum semuanya program yang dijalankan mencapai tujuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan.

Saran yang diberikan yakni 1) sebaiknya pemerintah daerah mendorong pegawai dan tim pengelola wisata yang belum mampu memahami sepenuhnya tentang kepariwisataan untuk menambah wawasan secara mandiri lebih dalam lagi mengenai pengelolaan kepariwisataan secara mandiri dengan memanfaatkan era kemajuan teknologi saat ini yang semuanya serba online, bisa melalui Google dan Youtube; 2) Dinas sebaiknya segera turun ke lapangan untuk mendata dan mendokumentasikan keadaan sarana prasarana yang rusak dan tidak memenuhi standar untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan dilaporkan kepada Bupati agar mendapat perhatian lebih dan segera ditindaklanjuti

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Indeks
- Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju
- Terry, George. R. 2008. Asas-Asas Manajemen. Bandung:Alumni.
- Warsito. 2001. Hukum Pajak. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada
- Yoeti, Oka. Edisi Revisi 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Penerbit Angkasa

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan  
Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah Tahun 2016-2021

**Sumber Lain**

Kabupaten Blitar dalam angka 2018. 2018, Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

[https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6944/5997.repository.upnjatim.ac.id/4594/1/skripsi ummaa-14-20.pdf](https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6944/5997.repository.upnjatim.ac.id/4594/1/skripsi_ummaa-14-20.pdf)

<http://repo.uinsatu.ac.id/11049/4/BAB%201.pdf>

[https://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2020/11/KBDA-020\\_Kominfo.pdf](https://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2020/11/KBDA-020_Kominfo.pdf)